

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, n.d.
- Adhayanto, Oksep. "Maritime Constitution." *Jurnal Selat* 2, no. 1 (n.d.): 139.
- ADYATMA EILEEN RASYID. "Shortage Container Pada Pelaku Usaha Ekspor Selama Pandemi Covid-19 Di Terminal Petikemas Semarang." Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, 2022.
- Afrizal. *Meotode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press, Cet I, 2014.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Azwar Saifudd. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Magister, 2003.
- Banu Santoso. *Port Terminal Operation*. Semarang: Akademi Maritim Indonesia, 1994.
- Barda Nawawi Arief. "Hukum Pidana Lanjutan." Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. *Hukum Dan Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama, 2008.
- Dellyana.Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1988.
- Edy Hidayat. *Pengoperasian Pelabuhan*. Jakarta: Pernyataan seri, 2009.
- Hamdi, Mirja Fauzul. "Kewenangan Pemerintah Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Perairan Indonesia." *Dalam Samudera Keadilan* vol.11 (2016): 33.
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Masalah Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harun M.Husen. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka

Cipta, 2007.

HENDRAWAN, YADI. "Penahanan Kapal Mt. Gloria Sentosa Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Gresik," 2022.

M.Gazali Rahman. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal ALhimayah* 4 (2020).

Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

P.Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Petter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Richard M.Wass. "Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Sasi* 22 (2016).

SEMBIRING, W S B R. *ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA HUKUM BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (PUTUSAN NOMOR 1094/Pid. Sus/2018/PT ...*, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan li. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soerjano Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Soerjano Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Sri Rejeki Hartono. "Pengangkutan Dan Hukum Pengangkutan Laut." Universitas Diponegoro, 1980.

Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Wulansari, Eka Martiana. "PENEGAKAN HUKUM DI LAUT DENGAN SISTEM SINGLE AGENCY MULTY TASKS." *RechtsVinding Online*, 2020, hlm 3.

## **Jurnal**

Sembiring, W S B R. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Hukum Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (Putusan Nomor 1094/Pid. Sus/2018/Pt.

Richard M.Wass. (2022). “Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia.” *Jurnal Sasi* 22.

Adhayanto, Oksep. “Maritime Constitution.” *Jurnal Selat* 2, No. 1 (N.D.): 139.

M.Gazali Rahman.(2020). “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Alhimayah* 4.

### **Skripsi**

Adyatma Eileen Rasyid. (2022). “*Shortage Container Pada Pelaku Usaha Ekspor Selama Pandemi Covid-19 Di Terminal Petikemas Semarang.*” Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.

### **Internet**

<https://hubla.dephub.go.id/uppsasio/page/news/read/11385/kemnhub-amankan-3-kapal-asing-dan-1-kapal-berbendera-indonesia-yang-beraktivitas-ilegal-di-wilayah-perairan-batam>.

<sup>1</sup><https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55761108>